

7-30-2022

## SRIKANDI PENDIRI BANGSA: PERJUANGAN DAN SUMBANGSIH MARIA ULFAH UNTUK KEMERDEKAAN INDONESIA

Yuda B. Tangkilisan

*Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, yebete@yahoo.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura>



Part of the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#), [Philosophy Commons](#), and the [South and Southeast Asian Languages and Societies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Tangkilisan, Yuda B. (2022) "SRIKANDI PENDIRI BANGSA: PERJUANGAN DAN SUMBANGSIH MARIA ULFAH UNTUK KEMERDEKAAN INDONESIA," *Multikultura*: Vol. 1: No. 3, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol1/iss3/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Multikultura by an authorized editor of UI Scholars Hub.



## **SRIKANDI PENDIRI BANGSA: PERJUANGAN DAN SUMBANGSIH MARIA ULFAH UNTUK KEMERDEKAAN INDONESIA**

**Yuda B. Tangkilisan**

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia  
yebete@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Di tengah-tengah gencarnya penulisan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah melalui sejumlah perdebatan historiografis mulai dari kemerdekaan sebagai hadiah Jepang hingga Indonesia merdeka karena Amerika Serikat, perhatian terhadap keterlibatan dan peranan perempuan mulai muncul. Namun, sorotan terhadap peranan perempuan dalam proses pendirian bangsa belum diketahui dan difahami dengan seksama. Dalam proses mempersiapkan kemerdekaan, tampak peranan perempuan pada kiprah sosok yang bernama Maria Ulfah yang pernah menjadi anggota BPUPKI. Sumbangsih perjuangannya itu tidak terlepas dari kiprah dan pengalaman yang dijalani pada masa sebelumnya. Perjuangannya terus berlanjut di sepanjang hayatnya terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga Indonesia. Sumbangsihnya yang tanpa pamrih dan untuk kemajuan bangsa menjadikannya salah seorang dari tokoh nasional sebagai Srikandi Pendiri Bangsa.

**KATA KUNCI:** Maria Ulfah, Srikandi Pendiri Bangsa, sumbangsih perjuangan, peranan perempuan, kemajuan bangsa.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tema penulisan dalam Historiografi Indonesia yang terus berkembang adalah Sejarah Revolusi Indonesia. Secara periodisasi, kurun waktu itu berlangsung antara tahun 1945 hingga 1949, atau sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Secara resmi, tanggal itu merupakan saat kelahiran Indonesia dan bangsa Indonesia secara politik, yang menjadi perwujudan cita-cita perjuangan pergerakan nasional ketika kesadaran berbangsa timbul (*Nationhood Conciousness*). Kurun waktu itu memperlihatkan dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui proklamasi tersebut. Dengan itu, temuan dan pemikiran baru senantiasa muncul dalam mengembangkan pemahaman (*verstehen*) dan penjelasan (*enklaren*) yang lebih mendalam dan bermanfaat untuk perkembangan bangsa dan negara.

Dalam lingkup historiografi, tema dan arah pembahasan telah mengalami perkembangan luar biasa. Perdebatan awal yang muncul dalam memahami peristiwa pembacaan teks proklamasi itu berkenaan dengan pendapat bahwa kemerdekaan itu merupakan hadiah Jepang (*Japanese gifts*). Janji kemerdekaan Jepang yang dikumandangkan sehubungan dengan upaya memenangkan perang dan perkembangan keadaan perang merupakan landasannya, termasuk perwujudannya



dengan pembentukan suatu badan mempersiapkan kemerdekaan. Di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia, pembentukan itu tampak pada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedatangan Soekarno dan rombongannya ke Dalat, Vietnam, menjelang kekalahan Jepang merupakan bagian dari penentuan nasib wilayah pendudukan. Juga pada foto yang bertalian dengan acara pembacaan proklamasi tampak seseorang berseragam para militer Jepang, yang menyiratkan seolah-olah memang ada keterlibatan pihak Jepang saat itu. Padahal, sesaat setelah acara itu selesai datang sejumlah perwira Jepang yang hendak menyelidiki acara tersebut.

Gambaran dan citra kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah Jepang disebarkan oleh pihak Belanda yang hendak mengukuhkan kembali kekuasaan jajahannya di Indonesia (*recolonization*). Belanda gencar mempengaruhi pimpinan tentara Inggris yang bertugas mewakili Sekutu, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, untuk mengambilalih kekuasaan dari Jepang selaku pihak yang kalah perang, termasuk membebaskan tawanan perang (*prisoners of war*). Pemimpin Republik Indonesia ketika itu, Soekarno dan M. Hatta yang ditetapkan setelah sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Presiden dan Wakil Presiden memiliki rekam jejak (*track records*) sebagai kolaborator pada masa pendudukan Jepang.

Dari perspektif historiografi, pandangan tersebut mengabaikan perjuangan yang berlangsung pada masa sebelumnya, masa Hindia Belanda. Kebebasan dan kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan perjuangan pada tokoh dan organisasi pergerakan nasional, yang dirintis oleh pendirian Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Walau sempat mencanangkan Politik Etis yang berlandaskan pada pengakuan hutang budi (*eereschuld*), pemerintah Belanda tidak pernah bersungguh-sungguh memberikan kemerdekaan kepada rakyat dan daerah jajahannya. Petisi Soetardjo yang dilayangkan pada Volksraad (Dewan Rakyat), sebuah parlemen semu kolonial, sebagai langkah awal pemberian kesempatan menjalankan kekuasaan dan partisipasi politik untuk kalangan bumiputera tidak mendapat tanggapan. Ketika bayang-bayang serbuan tentara Jepang dalam konteks Perang Pasifik kian menjadi nyata, janji-janji yang diserukan oleh Negeri Induk berlalu bagai angin tanpa memperoleh tanggapan. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan politik (*the vacuum of power*) yang diperoleh pada masa pendudukan itu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Perbedaan pandangan selanjutnya adalah mengenai peranan pemuda dalam proses proklamasi. Peristiwa Rengasdengklok menjadi pokok perdebatan. Menurut versi kelompok pemuda, peristiwa itu memang direncanakan dan merupakan penculikan untuk mendesak Sukarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan. Padahal, menurut pihak kaum tua, Sukarno dan kawan-kawan, terutama Hatta, peristiwa itu justru menunda rencana kemerdekaan. Kemudian, perdebatan historiografi berkisar pada peranan perjuangan diplomasi dan militer, atau antara *beroending* dan *bertempoer*. Setelah agak terpinggirkan selama beberapa dekade, perhatian terhadap perjuangan diplomasi mulai berkembang dan menyatu dengan perhatian terhadap peranan perjuangan bersenjata. Perkembangan mutakhir memperlihatkan perhatian terhadap peranan dunia internasional dalam perjuangan tersebut, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, Amerika Serikat dan Australia.



Peranan lainnya yang masih belum tereksplorasi lebih mendalam adalah keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peranan mereka masih ditempatkan pada garis kedua dan berada di belakang front perjuangan. Padahal, sumbangsih mereka berada di pelosok perjuangan, termasuk dalam proses perencanaan dan persiapan kemerdekaan. Artinya, pendirian bangsa juga melibatkan peranan mereka. Untuk itu, selain para Bapak Pendiri (*Founding Fathers*) ada juga Srikandi Pendiri Bangsa. Salah seorangnya adalah Maria Ulfah Soebadio yang menjadi anggota BPUPKI.

Penulisan ini berdasarkan pada Metode Sejarah (Gottschalk ; Kuntowijoyo). Sumber primer yang ditemukan berupa memoir, artikel dan surat kabar yang dilengkapi suatu karya biografis. Kritik atau verifikasi diberikan terhadap sumber-sumber tersebut agar layak dan memenuhi kaidah kritis untuk penelaahan. Setelah pemilahan dan pengolahan keterangan-keterangan yang terkandung dalam sumber-sumber itu, penyusunan fakta dilakukan untuk selanjutnya ditafsirkan selaras dengan konteks dan semangat zamannya masing-masing. Hasil penelaahan yang diperoleh memberikan kebaruan (*novelty*) di antara karya-karya yang dibuat sebelumnya. Kebaruan itu adalah menampilkan sosok Maria Ulfah sebagai perempuan yang memiliki keberanian untuk menantang belenggu zamannya, baik secara status sosial maupun gender, dan memiliki visi jauh ke masa mendatang mengenai peranan dan kiprah perjuangan perempuan dalam kemajemukan budaya (multikulturalisme) Indonesia.

Selanjutnya, pada masa revolusi kemerdekaan sebagai priode penting dalam pembentukan bangsa Indonesia, Maria Ulfah memainkan peranan yang cukup penting seperti perwira penghubung (*liason officer*) antara pihak RI dan Inggris dan menteri sosial. Setelah itu, ia aktif dalam memajukan partisipasi dan peranan kaumnya dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kesemua proses dan dinamika kiprahnya dalam perkembangan Indonesia tidak terlepas dari pengalaman dan rekam jejak perjalanannya sejak masa pendidikan dan masuk ke dunia pekerjaan dan pengabdian. Dengan gambaran yang utuh seperti itu tampak jelas sosoknya sebagai Srikandi Pendiri Bangsa, yang memiliki kemauan, kecerdasan, tekad, semangat dan ketegasan sebagai seorang tokoh nasional, sebagai seorang perempuan pejuang dan pejuang perempuan.

### **Menjadi Perempuan Pejuang**

Maria Ulfah lahir di Serang tanggal 18 Agustus 1911 di lingkungan keluarga priyayi. Ayahnya adalah seorang bupati Kuningan, yang bernama Raden Adipati arya Mohammad Ahmad. Ibunya bernama R.A. Hadidjah Djajadiningrat, adik dari Hosein Djajadiningrat dan Aria Achmad Djajadiningrat. Ayahnya adalah Raden Moehammad Achmad, putera Patih Caringin. Kedua orang tuanya masih memiliki hubungan keluarga, sebagai sepupu. Dalam kenangan pamannya, Pangeran Achmad Djajadiningrat tentang ayahnya adalah:

“Tanggal 2 September 1909 pada jam 7 pagi pernikahan antara saudaraku Chadidjah dengan sepupuku Raden Moehammad Achmad, putra dari bibiku yang menjadi istri Patih Caringin dilangsungkan. Pemuda ini seorang dari ‘gagak putih’ dalam masyarakat pribumi, karena ia memiliki Groot Ambtenaars diploma (diploma untuk pegawai tinggi), yang diperolehnya dengan nilai-nilai yang baik. Tetapi ia pun dimasukkan ke dalam ‘tempat singgah’ para pemuda pribumi yang berpendidikan akademis, yaitu pad dinas lembaga perkreditan rakyat.



Kebetulan masa dinas ‘tempat singgah’ itu selesai, sehingga ia harus ditempatkan pada dinas lain. Percobaan untuk menempatkan seorang pemuda pribumi seperti dia pada Bestuur Eropa ternyata tidak berhasil, sehingga sepupu dan iparku tersebut harus mencari pekerjaan lain. Kebetulan ada satu jabatan sebagai Jaksa Kepala yang sedang lowong. Maka ia ditempatkan di sana dulu, kemudian akan dilihat apakah tempat itu cocok baginya. Dengan demikian ia dijadikan Jaksa Kepala di Serang. Bayangkan saja, jika seorang Direktur *Javasche Bank* (Bank Sentral) diangkat menjadi Ketua *Raad van Justitie* (pengadilan Tinggi bagi orang pribumi). Baru saja beberapa hari iparku memulai jabatan baru itu, maka datanglah President *Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri) ke rumah saya. Ia rupanya kenalan pribadi Gubernur Jenderal pada ketika itu dan ia mengatakan a.l.: ‘Mengenai Jaksa Kepala di Serang yang baru ini harus berhasil.’ Rupanya memang berhasil, sebab tidak lama kemudian ia dinaikkan menjadi Patih sekaligus menjabat Wedana. Baginya barulah sekarang kesulitan-kesulitan dalam pekerjaannya dimulai, karena ia memiliki diploma yang serupa dengan yang dimiliki atasan-atasannya yang berbangsa Eropa. Maka *Resident Overduyn* jugala yang senantiasa memperingatkan pada bawahan yang berbangsa Eropa bahwa masa telah berubah dan batas-batas pun berubah pula.” (Djajadiningrat 1996: 334-335).

Kemudian ayahnya menjabat sebagai bupati Kuningan. Status sosial ningrat itu memungkinkannya untuk mengenyam pendidikan sekolah. Ketika menempuh pendidikan menengah di Batavia, ia dan adiknya dititipkan pada keluarga Belanda karena ayahnya bertugas di Kuningan. Kesempatan menempuh pendidikan dan memperluas pengetahuan semakin terbuka untuknya ketika mengikuti tugas ayahnya ke negeri Belanda tahun 1929. Di sana ia memilih pendidikan hukum di Leiden hingga memperoleh gelar sarjana hukum atau *meester in de rechten*. Ia termasuk perempuan-perempuan pribumi kolonial Hindia Belanda awal yang menyandang gelar pendidikan sarjana, terutama di bidang Ilmu Hukum.

Ia memiliki kenangan yang membanggakan tentang ayahnya. Betapa sang ayah memperhatikan dan mendidiknya hingga memperoleh kesempatan menempuh jenjang pendidikan tinggi yang tidak banyak diperoleh oleh perempuan sezamannya. Apalagi, ayahnya tidak pernah menegur, menghalangi atau membatasi pergerakannya dalam kancah politik perjuangan kebangsaan, walau mengetahui resiko yang dihadapi untuk sikap seperti itu. Bahkan tidak ragu-ragu ayahnya membelanya di hadapan atasannya. Suatu kenangannya mengisahkan:

“Walaupun saya tidak menjadi mahasiswa lagi, akan tetapi oleh karena saya bekerja sebagai guru, banyak berhubungan dengan pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa kita. Saya diminta untuk memberi ceramah did epan anggota PPPI (Perhimpunan Pelajar-pelajar Indoensia), yang diadakan di Gedung Perguruan Rakyat (PR) di Kramat. Karena ceramah-ceramah saya itu, ayah yang menjadi Bupati Kuningan dipanggil dan ditegur oleh Residen Cirebon (Van Der Plas). Ini tentu untyuk menyulitkan atau untuk menakutkan ayah, akan tetapi ayah menjawab, bahwa anaknya sudah dewasa dan telah tahu sendiri apa yang ia kehendaki. Kalau ia sebagai ayah dipersalahkan, silakan, akan tetapi ia tidak mau membatasi anaknya yang sudah dewasa itu.” (Soebadio 1986: 47)



Akhirnya, sikap itu berbuah resiko. Namun, tidak ada penyesalan yang timbul, bahkan ia merasa bangga terhadap ayahnya, yang kemudian malah terjun dalam pergerakan politik. Ia berkisah:

“Saya merasa beruntung bahwa ayah bersikap demikian. Ayah tidak dipecat atau diberhentikan, tetapi toh ada akibatnya. Ayah diminta supaya pension pada umur yang telah ditentukan bagi pegawai negeri, yaitu umur 55 tahun. Sedangkan paa waktu itu untuk bupati-bupati tidak dipakai batas umur, bahkan ada yang sampai pada umur 65 tahun menjadi bupati. Ayah tidak pernah melarang saya untuk ikut dalam pergerakan kemerdekaan bangsa kita. Malahan setelah ayah pension ia menjadi anggota Parindra (Partai Indonesia Raya). (Soebadio 1986: 47-48).

Maria Ulfah adalah sarjana hukum perempuan pertama bangsa Indonesia, yang memperolehnya dari pendidikan tinggi di negeri Belanda. Sebutan itu pantas disandangnya, terutama bangsa Indonesia, karena di tengah-tengah kesibukan mengikuti perkuliahan ia bersentuhan dengan cakrawala pergerakan nasional di Indonesia, yang melahirkan kesadaran emansipatifnya. Tidak seperti ketika bersekolah di Tanah Airnya yang dijajah, keterangan tentang perkembangan perjuangan emansipasi kebangsaan itu dengan mudah diperolehnya semasa kuliah di negeri penjajah bangsanya. Pidato pledoi Soekarno yang berjudul *Indonesia Menggugat* dengan mudah ditemukannya. Apalagi, ia sempat bertemu dan berkenalan dengan Sutan Syahrir, salah seorang tokoh pergerakan nasional. Ketika itu Syahrir juga sedang menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum. Pertemanan dengan Syahrir menggugah rasa dan semangat kebangsaan seirama dengan perkembangan perjuangan politik di Tanah Airnya. Bersama Syahrir, ia sempat hadir pada pertemuan Liga Anti Kolonialisme di Leiden. Ia mengenang peristiwa itu dan pertemuannya dengan Sjahrir, sebagai berikut:

“Waktu saya belajar di negeri Belanda saya ajar kenal dengan Bung Sjahrir. Saya diundang oleh keluarga dokter Djoehana ke Amsterdam di mana mereka tinggal. Dokter Djoehana seperti dokter Indonesia lainnya sedang memperdalam pelajarannya di bidang kedokteran (post-graduate study) dan isterinya adalah kakak kandung Sjahrir. Sjahrir tinggal pada kakaknya, karena sedang belajar pada Fakultas Hukum di Amsterdam. Setelah perkenalan di Amsterdam Sjahrir datang ke Leiden dan singgah di rumah saya. Rupanya Sjahrir hendak mengetahui bagaimana pandangan hidup saya. Ini ternyata dari pembicaraan kemudian. Bagaimana perasaan kau sebagai anak gadis Indonesia belajar di negeri Belanda? Saya jawab bahwa saya merasa bersyukur diberi kesempatan oleh Ayah belajar di negeri Belanda yaitu suatu negara yang merdeka. Berlainan sekali suasana di negara yang merdeka.

Saya tertarik pada usaha-usaha untuk memajukan rakyat, misalnya kaum buruh, setelah mereka keluar dari sekolah dasar (ada wajib belajar). Yang saya maksudkan adalah ‘*Volks Huizen*’ di mana buruh kecil dan anak-anaknya mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuannya dan mengembangkan bakatnya seperti mengikuti kursus, bahasa Inggris dan bahasa lainnya di waktu malam hari, mengikuti kursus jahit-menjahit bahkan belajar main sandiwara (theater). Saya ceritakan bahwa saya melihat sandiwara ‘*The Merchant of Venice*’ yang dimainkan oleh anak-anak buruh dan memakai bahasa yang mereka ucapkan sehari-hari (*Volkstaal*), saya tertarik pada kesungguhan mereka.



Saya juga ingin sekembali di tanah air menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk memajukan rakyat kita, khususnya kaum wanita yang masih amat kurang pendidikannya. Saya juga kemukakan betapa besar pengaruh ‘Sumpah Pemuda’ pada saya waktu masih di bangku sekolah menengah di Jakarta. Setelah itu rupanya Sjahir sudah mengetahui bagaimana pikiran saya. Saya diajaknya ke pertemuan liga anticolonialisme yang diadakan di Gedung Bioskop di Hooge Woerd di Leiden. Di sana saya diperkenalkan kepada pembicara utama yang bernama Jef Last.

Saya diberi buku mengenai kisah seorang gadis Tionghoa, seorang pejuang dan pengikut Mao Tse Tung. Masih ingat waktu saya membaca buku itu seorang kawan, seorang anak Bupati datang ke rumah saya. Melihat buku saya itu, ia menegur saya dan mengingatkan bahwa saya juga seorang anak Bupati dan dapat menyulitkan ayah saya, jika ikut-ikutan perjuangan.” (Anwar 1980: 92-93)

Setahun sebelum diwisuda, ia berpisah dengan teman intelektualnya itu karena Syahir kembali ke Indonesia. Ia memiliki kesan tertentu terhadap sahabatnya itu. Setelah Sutan Syahir tiada, ia ikut mengisi buku kenangan yang menceritakan episode kehidupannya bersama tokoh tersebut.

Sekembalinya ke Tanah-Air tahun 1933, ia tidak langsung terjun ke dalam pergerakan politik. Ia mendapat tawaran untuk mengajar pada Sekolah Menengah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat di Jakarta. Keadaan pendidikan kebangsaan ketika itu sedang dilanda kebijakan Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*) tahun 1933. Sebagai bagian dari menguatnya pengawasan pemerintah kolonial terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia, kebijakan ini dicanangkan. Sebagai akibatnya, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pergerakan nasional ditutup. Terjun dalam pendidikan tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan menghindari politik pergerakan kebangsaan, justru pembinaan pendidikan memegang kunci penting dalam memperluas gagasan-gagasan perjuangan. Dalam kancah pembentukan watak itu, ia bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Wilopo, SH, Soemanang, SH, M. Yamin, SH, Dr. A.K. Gani, Ir. Djuanda, Sahardjo, SH dan sejumlah lainnya. Ia mengabdikan diri dalam kancah perjuangan itu selama 8 tahun, hingga runtuhnya Hindia Belanda (Soebadio 1986: 46).

### **Peranan dalam Rancangan Kemerdekaan Indonesia**

Ketika menguasai Indonesia, Jepang memanfaatkan struktur pemerintahan yang ada sebelumnya, terutama pemerintahan pribumi (*inlandsche besturen*). Struktur pemerintahan atau birokrasi Hindia Belanda terdiri atas pemerintahan Eropa (*Europeesche* atau *Binnenlandsche Bestuur*) dan pemerintahan bumiputera, kecuali di wilayah kerajaan (*Vorstenlanden*). Ketika berkuasa, kalangan birokrat Belanda ditawan dan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh birokrasi bumiputera. Jepang tidak mengubah banyak susunan pemerintahan, kecuali mengubah sebutan departemen-departemen yang ada. Berbeda dengan pemerintahan masa Hindia Belanda, kekuasaan tertinggi berada pada penguasa militer atau Saiko Sikikan. Susunan ini sesuai dengan keadaan ketika itu, yang sedang dilanda perang.

Dalam menjalankan kekuasaan dan komunikasi politik, yang bertumpu pada pengerahan sumber daya, baik manusia maupun alam untuk memenangkan perang, peranan dan keterlibatan elite



bumiputera menjadi sangat penting. Apalagi, pihak Jepang telah mengetahui perkembangan perjuangan politik di Indonesia yang bersikap anti kolonialisme Belanda. Jepang memanfaatkan keadaan itu untuk mengobarkan rasa cinta tanah air, kebangsaan dan anti Barat. Jepang memang menjadi teladan untuk bangsa-bangsa Asia yang sedang berjuang menghadapi penjajahan sejak mengalahkan Rusia dalam perang tahun 1904-05. Kemajuan ekonomi, terutama industrialisasinya, menimbulkan kekaguman di kalangan tokoh pergerakan nasional. Walau sebagian mereka juga mewaspadaikan bahaya ideologi totaliterianisme dan militerisme Jepang.

Keramahan Jepang segera berubah saat memasuki wilayah Indonesia, setelah mengalahkan bala tentara Hindia Belanda dalam pertempuran-pertempuran baik di laut maupun di darat. Politik dan pola pemerintahan Jepang yang militeristik tidak banyak memberikan pilihan untuk bangsa Indonesia, kecuali bekerja sama. Mereka menjadi bagian dari rantai komando Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagian kalangan memilih untuk non kooperatif tetapi tidak dapat berbuat banyak karena pengawasan militer yang begitu ketat.

Maria Ulfah Santoso yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Belanda masuk ke dalam Departemen Kehakiman di bawah pimpinan Mr. Soepomo, yang dikenalnya saat bersama-sama mengajar di sekolah menengah. Tugasnya adalah menterjemahkan peraturan dan sejenisnya dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris agar dapat difahami oleh penguasa Jepang. Ketika Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan penyusunan kabinet presidensial pertama, ia masih bekerja di instansi tersebut.

Ketika rencana untuk memerdekakan Indonesia semakin jelas, pemerintah Jepang memprakarsai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zombi Cosakai, yang dipimpin oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Maria Ulfah merupakan salah satu dari anggota perempuan dalam badan tersebut. Berdasarkan keputusan sidang-sidang yang dilaluinya, ia masuk ke dalam Panitia penyusunan Undang-undang Dasar. Berdasarkan keterangan dari buku Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI tahun 1945 kompilasi dari Sekretariat Negara Republik Indonesia tanpa tahun, dalam salah satu pembicaraan dari sidang-sidang itu, ia sempat melontarkan pendapat tentang perlu dimasukkan rincian perlindungan hak azasi manusia agar lebih terjamin. Namun, pendapat ini ditolak oleh pimpinan rapat ketika itu.

### **Kiprah dalam Deru Revolusi Kemerdekaan**

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilangsungkan tidak seperti rencana semula, yakni di Lapangan Ikada. Menyadari keadaan yang tidak menguntungkan, karena adanya kekuatan militer Jepang yang walau telah kalah perang masih memiliki persenjataan yang lengkap dan menyanggah perintah penguasa Sekutu untuk menjaga *status quo*, para perancang kemerdekaan dan naskah proklamasi mengambil langkah-langkah yang arif dan bijaksana tidak mengadakannya di lapangan tersebut, yang kemungkinan besar mengundang kehadiran massa yang banyak sehingga menjadi suatu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam anggapan Jepang. Sejak awal, kemungkinan riwayat Republik yang telah lama diidam-idamkan, dimimpikan dan diperjuangkan sejak masa Pergerakan Nasional itu, hanya berusia muda telah menjadi pemikiran



dan kecemasan mereka. Para pendiri bangsa itu selalu menghindari konflik terbuka terutama dengan pihak bala tentara Jepang. Oleh karena itu, proklamasi diselenggarakan di kediaman Soekarno, yang walau dihadiri sejumlah unsur masyarakat terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa, jauh dari kesan gegap gempita dan sorak sorai. Tentu, bias kesederhanaan itu tidak berarti menghilangkan makna, khidmat dan semangat.

Ketika perubahan politik terjadi dalam sistem pemerintahan dari kabinet presidensial menjadi parlementer, bersamaan dengan perubahan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi parlemen, ia mulai masuk ke lingkaran politik nasional. Oleh Syahrir, yang menjadi Perdana Menteri pertama, ia ditunjuk menjadi perwira penghubung (*liason officer*) dalam pembicaraan dan perundingan dengan Inggris, yang datang sebagai wakil pasukan Sekutu, South East Asia Command (SEAC), untuk mengambilalih kekuasaan dari penguasa Jepang dan mengurus tawanan perang (*prisoner of war*).

Pada kabinet Syahrir II, ia mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan menjadi Menteri Sosial. Dalam upaya menyelesaikan masalah tawanan perang, ia bekerja sama dengan pihak Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) yang dipimpin oleh isteri Lord Mountbatten, panglima SEAC. Tugas itu dilaksanakan oleh RAPWI dan POPDA. Di samping itu dalam tugas-tugasnya, ia kerap mendampingi Syahrir, seperti misalnya pada “2 April 1946 di geladak kapal penjelajah Norfolk diselenggarakan jamuan perpisahan untuk Sir Archibald Clark Kerr yang akan pulang ke Inggris. Hadir dalam jamuan tersebut Perdana Menteri Syahrir dan Nyonya Maria Ulfah Santoso. Malamnya giliran Perdana Menteri Syahrir menjamu Duta Inggris tersebut. Hadir Letnan Jenderal Stopford, konsul Amerika, Inggris, Australia dan Tiongkok. Juga para menteri perwira dan perwira tinggi Indonesia. Sebagai hiburan dipertunjukkan beberapa tarian Jawa dari Solo.” (*Majalah Pantja Raja*, 15 April 1946, dalam: Toer dkk. II 1999: 166).

Ia menjalankan peranannya sebagai Menteri Sosial sebaik-baiknya. Ia menyambung komunikasi dengan sejumlah organisasi, seperti badan Kongres Wanita. Pada 17 Mei 1946 ia memberikan keterangan kepada perkumpulan itu bahwa para pemimpin wanita Inggris, India dan Australia menaruh minat kepada pergerakan wanita Indonesia. Mereka berniat datang ke Surakarta dalam rangka peninjauan keadaan di kota itu. Segera Badan Kongres Wanita dan Pergerakan Wanita Solo bersiap-siap untuk melakukan penyambutan terhadap kunjungan itu agar memberikan kesan yang baik, demi mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tampak bahwa seruan menteri sosial itu memperoleh tanggapan dari pergerakan wanita. (*Majalah Pantja Raja* 1 Juni 1946, dalam Toer dkk. II 1999: 207)

Pada 13 Juni 1946 di Tangerang yang diduduki NICA terjadi kekacauan. Di kota itu berlangsung pembunuhan, penculikan penyiksaan dan konflik sosial, termasuk bentrokan dengan penduduk Indonesia. Kelompok Cina menjadi sasaran dalam kerusuhan itu. Segera pada 15 Juni 1946 Mr. Maria Ulfah Santoso, Menteri Urusan Sosial melakukan kunjungan ke tempat penampungan di kota Jakarta, dimana pengungsi korban kerusuhan itu dikumpulkan. Setidaknya sekitar 8.000 pengungsi tercatat yang berasal dari kota Tangerang dan sekitarnya (Toer dkk. II 1999: 232)



Kegiatan Maria Ulfa berikutnya adalah mendampingi Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan K.L. Punjabi, utusan India urusan beras. Pada 25 Juni 1946 dengan iringan sejumlah wartawan, rombongan itu berangkat ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Presiden Sukarno. Selanjutnya, dari kota itu rombongan menuju ke Solo. Dalam rombongan itu termasuk Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri kemakmuran dan Mr. Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial. Selanjutnya, rombongan meneruskan perjalanan ke Jawa Timur guna melihat secara langsung keadaan padi yang akan dikirimkan ke India. (*Majalah Pantja Raja* 1 Juli 1946, dalam Toer dkk II 1999: 244) Pada 17 Agustus 1946 dilangsungkan perayaan peringatan ulang tahun pertama RI di Jakarta, Kota itu berada di bawah pengawasan tentara Inggris mewakili Sekutu (*Allied Forces*). Otoritas militer itu melarang keinginan perayaan itu. Walau mengetahui adanya larangan itu, Maria Ulfah Santoso, tetap bergeming. Ia memimpin rombongan pelajar wanita menerobos penjagaan polisi tentara Inggris yang berusaha mencegah kedatangan penduduk Jakarta ke halaman kediaman Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Kemudian atas prakarsa wanita Republik, di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, itu didirikan Tugu Peringatan Proklamasi, yang diresmikan oleh Perdana Menteri sendiri. (*Majalah Pantja Raja* 1 Juli 1946, dalam Toer dkk II 1999: 345). Tugas lainnya adalah mewakili Presiden Soekarno memberikan pesan. Pada 16 Nopember 1946 Mr. Maria Ulfah Santoso menyampaikan kepada kaum buruh Indonesia sebuah lambang persahabatan dari kaum buruh Australia yang tergabung dalam "Mackay Trade and Labour Council". Lambang yang berupa palu itu diserahkan dalam sebuah resepsi sebagai bagian dari acara Konperensi Buruh Wanita dan Gasbi (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Upacara penyerahan itu memperoleh sambutan yang meriah dari hadirin, dan disusul dengan beramai-ramai menyanyikan lagu "Internationale". (*Majalah Pantja Raja* 1 Juli 1946, dalam Toer dkk II 1999: 503-504)

Peranan Maria Ulfa Santoso yang terekam dalam berbagai catatan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah pada saat perundingan awal antara Indonesia dan Belanda. Setelah kegagalan perundingan Hoge Veluwe, perundingan lanjutan dilaksanakan di bawah pengawasan Inggris. Perundingan yang dilakukan sekitar 11 kali bergantian di kediaman Perdana Menteri merangkap Menteri luar negeri Sutan Syahrir dan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta itu hendak diakhiri dengan pembicaraan akhir menuju suatu kesepakatan. Persoalan timbul menyangkut masalah tempat perundingan. Pihak Indonesia berkeberatan, terutama Presiden dan Wakil Presiden, apabila diselenggarakan di Jakarta, atau Batavia menurut versi Belanda, karena persoalan jaminan keamanan. Sebaliknya, delegasi Belanda tidak setuju apabila diadakan di Yogyakarta. Untuk itu dipikirkalah tempat yang dipandang netral dan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Maria Ulfa tampil dengan menawarkan tempat di Linggarjati yang terletak di wilayah Kuningan. Tempat itu sejuk dan indah, memiliki sebuah hotel yang sesuai untuk perundingan. Keamanan pun terjamin untuk kedua belah pihak karena tidak berada di bawah kekuasaan militer salah satu pihak. Jaraknya tidak terlalu jauh untuk dicapai dari kota Cirebon, dimana delegasi Belanda datang melalui jalur laut dari Jakarta. Keresidenan Kuningan diperintah oleh ayahanda Maria Ulfa. Di tempat itulah kemudian lahir kesepakatan perjanjian Linggarjati (Hoesein 2010: 212; Boediardjo 1992: 17).

Perjanjian Linggarjati menjadi kontroversi dalam penulisan sejarah Indonesia masa revolusi kemerdekaan. Menurut versi perjuangan bersenjata, perjanjian itu merupakan langkah



mundur dalam perjuangan karena hanya menghasilkan pengakuan de facto wilayah Indonesia sebatas pulau Jawa, Sumatra dan Madura. Namun, menurut penelitian R.Z. Leirissa (2006), hasil perjanjian itu, yang kemudian dilanggar oleh pihak Belanda dengan melancarkan Agresi Militer

Pertama, memberikan landasan perjuangan diplomasi berikutnya, yaitu pembentukan sebuah negara serikat. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berfaham federalism untuk ikut serta, sehingga muncul gagasan federalisme tandingan terhadap van Mook, dari Anak Agung Gde Agung, seorang tokoh pendiri Negara Indonesia Timur.

Setelah perjanjian Linggarjati, kabinet Syahrir mundur dari tugasnya, termasuk Maria Ulfa. Namun ia tetap menjalankan peranannya sebagai perempuan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Peranan itu dilakukannya dengan tanpa pamrih dan mengharapkan balas jasa. Panggilannya sebagai pejuang perempuan Indonesia tidak bisa menyurutkan langkah untuk kemudian mundur dari gelanggang perjuangan. Perjuangannya tetap berlanjut di masa pasca pengakuan kedaulatan. Ia memberikan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negaranya, Indonesia yang majemuk (multikultural).

## **PENUTUP**

Bangsa dan negara Indonesia tidak lahir dan dibidani oleh seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari kebangkitan, pergerakan dan perjuangan berbagai komponen masyarakat yang terbelenggu oleh penjajahan dan memiliki keinginan dan hasrat untuk merdeka. Berbagai kekuatan, kelompok dan tokoh mewarnai perjalanan menuju dan mempertahankan kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Salah seorangnya adalah Maria Ulfa, seorang putri bangsawan penguasa dari Kuningan yang tidak tunduk terhadap tata karma dan adat istiadat yang mengatur kehidupannya sesuai dengan status sosial politiknya. Ia beranjak dewasa dengan kemauan dan cita-cita yang kuat untuk menggapai kemajuan, meninggalkan garis kehidupan yang seharusnya dijalani sebagai seorang putri aristokrat.

Untuk itu, ia menempuh pendidikan setinggi mungkin yang mampu diraih. Dalam merintis cita-cita itu, ia mengejarnya hingga ke negeri sang penjajah, Negeri Belanda. Dalam menempuh pendidikan tinggi itu, ia berkenalan dengan dunia dan tokoh politik pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, negerinya yang sedang terjajah. Masa itu membentuk cita-cita dan semangat perjuangan untuk merdeka yang diwujudkan setelah menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana ketika kembali ke Tanah Air. Segera ia terlibat dalam pergerakan nasional, walau di bidang pendidikan.

Pada masa pendudukan Jepang, ia dilibatkan dalam administrasi pemerintahan. Malahan, ia ditunjuk sebagai anggota badan persiapan kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Ia ikut berpartisipasi dalam pembicaraan dan perdebatan dalam badan tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia memperoleh kepercayaan untuk menjadi anggota cabinet pemerintahan yang menyandang tugas tidak ringan untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh kedaulatan, termasuk mengurus pemerintahan sehari-hari yang penuh dengan berbagai tugas, baik yang rutin, resmi maupun protokoler. Ia kerap mendampingi perdana menteri dalam menyambut dan menerima delegasi asing. Sumbangsihnya telah menorehkan arti penting dalam perjalanan dan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, yang tidak berhenti setelah pengakuan kedaulatan



diperoleh, namun dilanjutkannya dalam kiprah yang mengguratkan perjuangan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Semoga perjuangannya menjadi inspirasi dan dorongan untuk perempuan Indonesia agar terus berjuang untuk bangsa dan negaranya yang majemuk (multicultural).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djajadiningrat, Aria Achmad (1996). *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Jakarta: Paguyuban Keturunan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat
- Gottschalk, Louis (1976). *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Hoesein, Rushdy (2010). *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Kompas
- Kuntowijoyo (1995/ 2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Leirissa, R.Z. (2006). *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah
- Maria Ulfah Subadio (1980). "Bung Sjahrir" dalam: Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia,
- (1986). "Arti Sumpah Pemuda", dalam: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah (penghimpun). *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mohr, Marie V (1984). "My Sister's Arise, Maria Ullfah Soebadio." *The Call of the Hibiscus Indonesia's Message to the World*. Singapore: Gunung Agung
- Rasid, Gadis (1982). *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (komp.) (tt). *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) Yang berhubungan dengan Penyusunan Undang-undang Dasar 1946*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagy Toer, Ediati Kamil (1999). *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid II (1946). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & Yayasan Adikarya IKAPI, The Ford Foundation